



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU
Nomor : 180.188/K.5/2023

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2023

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas penyusunan Peraturan Kepala Daerah yang terarah, terkoordinasi, dan terpadu sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyebutkan perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

- tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berupa Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang dibahas pada Tahun 2023;
- KETIGA : Apabila dalam tahun berkenaan terdapat usulan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dari Perangkat Daerah yang sangat penting dan mendesak untuk dibahas, maka dapat dilakukan perubahan atas Keputusan ini;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2023;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 9 Januari 2023

BUPATI MAHAKAM ULU,

ttd

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur - **Samarinda**;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kaltim - **Samarinda**;
3. Ketua DPRD Kabupaten Mahakam Ulu - **Ujoh Bilang**;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu - **Ujoh Bilang**;
5. Inspektur Kabupaten Mahakam Ulu - **Ujoh Bilang**;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAHAKAM ULU
 NOMOR : 180.188/K.5/2023
 TANGGAL : 9 JANUARI 2023
 TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2023.

=====

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TAHUN 2022

No	JENIS	JUDUL	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT / INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPALAN
				BARU	UBAH/ CABUT			
1	PERBUP	ELIMINASI MALARIA	Menindaklanjuti Pasal 8 ayat (1) huruf b Permenkes No 82 tahun 2014 dan Pasal 2 Permenkes No 41 tahun 2018	Baru		2023	DINKESP2KB	2023
2	PERBUP	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG	Menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Permen PAN & RB No 17 tahun 2021 dan Pasal 2 Permen PAN & RB No 25 tahun 2021	Baru		2023	BAG. ORTAL	2023
3	PERBUP	MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	Mengacu pada Permen +PAN & RB No 3 tahun 2020	Baru		2023	BKPSDM	2023
4	PERBUP	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH	Menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Permen PAN & RB No 17 tahun 2021 dan Pasal 2 Permen PAN & RB No 25 tahun 2021	Baru		2023	BAG. ORTAL	2023
5	PERBUP	POLA KARIR PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	Sesuai ketentuan Pasal 188 ayat (4) dan ayat (5) PP No 11 tahun 2017	Baru		2023	BKPSDM	2023
6	PERBUP	PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN MELALUI PROGRAM KETAHANAN KELUARGA	Pemberian santunan	Baru		2023	DINSOSP3A	2023
7	PERBUP	PENETAPAN PEMBANGUNAN NON PARIWISATA	Penetapan wilayah non pariwisata	Baru		2023	DISPARPORA	2023
8	PERBUP	KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual	Baru		2023	BPKAD	2023
9	PERBUP	PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	Pedoman pelaksanaan Tubel ASN	Baru		2023	BKPSDM	2023
10	PERBUP	PEDOMAN TATA KELOLA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD. GERBANG SEHAT MAHULU	Pedoman penyelenggaraan BLUD	Baru		2023	DINKESP2KB	2023
11	PERBUP	PEDOMAN TATA KELOLA POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RS. NAWACITA DATAH DAVE	Pedoman penyelenggaraan BLUD	Baru		2023	DINKESP2KB	2023

12	PERBUP	PEDOMAN TATA KELOLA PENGELOLAAN LAYANAN UMUM UJOH BILANG	KELOLA KEUANGAN DAERAH PUSKESMAS	POLA BADAN PUSKESMAS	Pedoman penyelenggaraan BLUD	Baru		2023	DINKESP2KB	2023
13	PERBUP	PEDOMAN TATA KELOLA PENGELOLAAN LAYANAN UMUM LONG HUBUNG	KEUANGAN DAERAH PUSKESMAS	POLA BADAN PUSKESMAS	Pedoman penyelenggaraan BLUD	Baru		2023	DINKESP2KB	2023
14	PERBUP	PEDOMAN TATA KELOLA PENGELOLAAN LAYANAN UMUM LAHAM	KELOLA KEUANGAN DAERAH PUSKESMAS	POLA BADAN PUSKESMAS	Pedoman penyelenggaraan BLUD	Baru		2023	DINKESP2KB	2023
15	PERBUP	PEDOMAN TATA KELOLA PENGELOLAAN LAYANAN UMUM LONG PAHANGAI	KELOLA KEUANGAN DAERAH PUSKESMAS	POLA BADAN PUSKESMAS	Pedoman penyelenggaraan BLUD	Baru		2023	DINKESP2KB	2023
16	PERBUP	PEDOMAN TATA KELOLA PENGELOLAAN LAYANAN UMUM TONG OHANG	KELOLA KEUANGAN DAERAH PUSKESMAS	POLA BADAN PUSKESMAS	Pedoman penyelenggaraan BLUD	Baru		2023	DINKESP2KB	2023
17	PERBUP	PEDOMAN TATA KELOLA PENGELOLAAN LAYANAN UMUM MAMAHAK BESAR	KELOLA KEUANGAN DAERAH PUSKESMAS	POLA BADAN PUSKESMAS	Pedoman penyelenggaraan BLUD	Baru		2023	DINKESP2KB	2023
18	PERBUP	PEDOMAN MELALUI KEJURANGA	PEMBERIAN PROGRAM KETAHANAN	SANTUNAN	Pedoman Pemberian Santunan	Baru		2023	DINSOSP2PA	2023
19	PERBUP	PERUBAHAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023	RENCANA KERJA	KERJA	RKPD Tahun 2023	Baru		2023	Bapelitbangda	2023
20	PERBUP	RENCANA KERJA TAHUN 2024	PEMERINTAH DAERAH	DAERAH	RKPD Tahun 2024	Baru		2024	Bapelitbangda	2023
21	PERBUP	PRIORITAS PENGGUNAAN KAMPUNG TAHUN 2024	ALOKASI DANA	DANA	Alokasi Dana Kampung	Baru		2023	DPMK	2023
22	PERBUP	TATA CARA PEMBAGIAN ANGGARAN 2024	PENGALOKASIAN DANA KAMPUNG	DAN TAHUN	Dana Kampung	Baru		2023	DPMK	2023
23	PERBUP	TATA CARA PEMBAGIAN TAHUN ANGGARAN 2024	PENGALOKASIAN DANA KAMPUNG	DAN TAHUN	Alokasi Dana Kampung	Baru		2023	DPMK	2023
24	PERBUP	BANTUAN KEPADA KAMPUNG	KEUANGAN PEMERINTAH		Bantuan Keuangan Kepada Kampung	Baru		2023	DPMK	2023
25	PERBUP	RANCANGANA RENCANA BILANG	DETAIL TATA RUANG	UJOH	Menindaklanjuti PP No 21 tahun 2021	Baru		2023	DPUPR	2023
26	PERBUP	KEDUDUKAN, TUGAS DAN BADAN	SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA		Menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Permen PAN & RB No 17 tahun 2021 dan Pasal 2 Permen PAN & RB No 25 tahun 2021	Baru		2023	BAG. ORTAL	2023

27	PERBUP	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Permen PAN & RB No 17 tahun 2021 dan Pasal 2 Permen PAN & RB No 25 tahun 2021	Baru			2023	BAG. ORTAL	2023
28	PERBUP	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Permen PAN & RB No 17 tahun 2021 dan Pasal 2 Permen PAN & RB No 25 tahun 2021	Baru			2023	BAG. ORTAL	2023
29	PERBUP	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Permen PAN & RB No 17 tahun 2021 dan Pasal 2 Permen PAN & RB No 25 tahun 2021	Baru			2023	BAG. ORTAL	2023
30	PERBUP	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA ABADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Permen PAN & RB No 17 tahun 2021 dan Pasal 2 Permen PAN & RB No 25 tahun 2021	Baru			2023	BAG. ORTAL	2023
31	PERBUP	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Permen PAN & RB No 17 tahun 2021 dan Pasal 2 Permen PAN & RB No 25 tahun 2021	Baru			2023	BAG. ORTAL	2023
32	PERBUP	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Permen PAN & RB No 17 tahun 2021 dan Pasal 2 Permen PAN & RB No 25 tahun 2021	Baru			2023	BAG. ORTAL	2023
33	PERBUP	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Permen PAN & RB No 17 tahun 2021 dan Pasal 2 Permen PAN & RB No 25 tahun 2021	Baru			2023	BAG. ORTAL	2023
34	PERBUP	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Permen PAN & RB No 17 tahun 2021 dan Pasal 2 Permen PAN & RB No 25 tahun 2021	Baru			2023	BAG. ORTAL	2023
35	PERBUP	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI	Menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Permen PAN & RB No 17 tahun 2021 dan Pasal 2 Permen PAN & RB No 25 tahun 2021	Baru			2023	BAG. ORTAL	2023
36	PERBUP	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	Menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Permen PAN & RB No 17 tahun 2021 dan Pasal 2 Permen PAN & RB No 25 tahun 2021	Baru			2023	BAG. ORTAL	2023
37	PERBUP	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	Menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Permen PAN & RB No 17 tahun 2021 dan Pasal 2 Permen PAN & RB No 25 tahun 2021	Baru			2023	BAG. ORTAL	2023
38	PERBUP	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT	Menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Permen PAN & RB No 17 tahun 2021 dan Pasal 2 Permen PAN & RB No 25 tahun 2021	Baru			2023	BAG. ORTAL	2023

39	PERBUP	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Permen PAN & RB No 17 tahun 2021 dan Pasal 2 Permen PAN & RB No 25 tahun 2021	Baru		2023	BAG. ORTAL	2023
40	PERBUP	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Permen PAN & RB No 17 tahun 2021 dan Pasal 2 Permen PAN & RB No 25 tahun 2021	Baru		2023	BAG. ORTAL	2023
41	PERBUP	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Permen PAN & RB No 17 tahun 2021 dan Pasal 2 Permen PAN & RB No 25 tahun 2021	Baru		2023	BAG. ORTAL	2023
42	PERBUP	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	Menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 Permen PAN & RB No 17 tahun 2021 dan Pasal 2 Permen PAN & RB No 25 tahun 2021	Baru		2023	BAG. ORTAL	2023
43	PERBUP	PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH	Bantuan Operasional Sekolah Daerah	Baru		2023	Disdik	2023
44	PERBUP	PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023	APBD Tahun 2023	Baru		2023	Bapelitbangda	2023
45	PERBUP	PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024	APBD Tahun 2023	Baru		2023	Bapelitbangda	2024
46	PERBUP	PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	- Peraturan Bupati Yang Lama Sudah Tidak Sesuai Dengan Kondisi Saat Ini. - Dengan Berlakunya Peraturan PerUU Yang Baru Ttg. Pengelolaan Keuangan Daerah Maka Perlu Penyesuaian.	Cabut		2023	BKPSDM	2023

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ARSENIOUS LUHAN, SE.M.Hum
NIP. 19820402 201001 1 016

Ditetapkan di Ujoh Bilang
pada tanggal 9 Januari 2023

BUPATI MAHAKAM ULU,

tttd

BONIFASIOUS BELAWAN GEH